

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran legislatif, umur, dana perimbangan dan ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Dengan demikian sampel penelitian dengan periode 2 tahun (2015-2016) sebanyak 54 Kota/Kabupaten. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan dari penelitian, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ukuran Legislatif yang diproksikan dengan jumlah anggota DPRD berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Semakin banyaknya jumlah anggota DPRD, maka akan semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD tersebut. Dengan semakin besarnya pengawasan dari anggota DPRD, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut.
2. Umur Administratif Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan umur Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang pembentukannya

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Semakin besar umur administratif Pemerintah Daerah menandakan semakin matangnya atau tuanya suatu Pemerintah Daerah. Dengan semakin tuanya suatu Pemerintah Daerah menandakan bahwa sudah berpengalaman Pemerintah Daerah tersebut. Dengan semakin berpengalamannya suatu Pemerintah Daerah menandakan bahwa seharusnya semakin banyak hal-hal yang dapat diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut.

3. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Semakin tinggi tingkat dana perimbangan maka semakin tinggi tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal itu dikarenakan dana perimbangan adalah bentuk transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membantu Pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Maka dari itu, Pemerintah Daerah melakukan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat atas dana yang diberikan dengan melakukan pengungkapan secara keseluruhan.
4. Ukuran Pemerintah Daerah yang diprosikan dengan natural logaritma Total Aset tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah yang memiliki Total Aset yang besar tidak memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan pengungkapan LKPD karena pencatatan dari Total Aset yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang ada di Jawa Barat masih belum tertata dengan baik sehingga berdampak pada proses pengungkapan yang dilakukan.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka peneliti akan memberikan implikasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Implikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian yang telah dilakukan ini dapat dijadikan informasi untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengungkapan atas LKPD yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut dan penelitian ini juga dapat dijadikan evaluasi untuk masa yang akan mendatang agar lebih baik lagi dalam menyajikan dan mengungkapkan LKPD sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku yaitu SAP. Pemerintah Daerah seharusnya lebih mengamati faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Tingkat Pengungkapan LKPD, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan serta menyajikan LKPD yang sesuai dengan SAP yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada BPK, Pemerintah Pusat, dan masyarakat.
2. Bagi Pemerintah Pusat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan kebijakan apa yang akan diterapkan terhadap Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP yang berlaku. Pemerintah Pusat seharusnya dapat memantau dan mengawasi perolehan dari Tingkat Pengungkapan Wajib yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia, pada penelitian ini khususnya untuk Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut bertujuan agar Pemerintah Daerah

terdorong atau termotivasi untuk dapat menyajikan LKPD sesuai dengan SAP yang berlaku dan melakukan pengungkapan sesuai dengan butir-butir pengungkapan wajib yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan informasi yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dari masyarakat agar turut serta melakukan pengawasan. Masyarakat sebagai pihak yang juga turut andil dalam pelaksanaan pemerintahan seharusnya dapat lebih peka dan peduli terhadap jalannya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, bentuk kepekaan dan kepedulian tersebut dapat dalam bentuk diadakannya pengawasan terhadap jalannya kegiatan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sebagai organisasi sektor publik memiliki kewajiban untuk membuat dan menyajikan LKPD yang selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas kontribusi masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pemabayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka dari itu dibutuhkan pengawasan dari masyarakat agar Pemerintah Daerah terdorong untuk melakukan pengungkapan secara penuh.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran dari keterbatasan penelitian yang ada. Diharapkan saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya dapat memperbaiki hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini membatasi periode selama 2 tahun, diharapkan peneliti selanjutnya agar menambahkan periode penelitian lebih dari 2 tahun. Dengan periode penelitian yang lebih panjang diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan tidak menimbulkan bias.
2. Penelitian ini masih menggunakan variabel dari faktor non-keuangan seperti Ukuran Legislatif dan Umur Administratif Pemerintah Daerah. Maka dari itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel dari faktor keuangan seperti Opini Audit, Kekayaan Pemerintah Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian LKPD Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, disarankan untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan sampel dari Kota/Kabupaten provinsi lain yang ada di Indonesia.